



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

2025-2029

SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA



Bappeda Temanggung



bappedatemanggung



Bappeda Temanggung

VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan,



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator,



DWI LESTARI, ST.
NIP. 19940916 202202 2 001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDANG SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 ini dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. BAPPERIDA merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. Keberadaan BAPPERIDA menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Pengkajian dan Penerapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami jajaran BAPPERIDA Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap hasil dari Renstra BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar di kemudian hari dapat menyusun perencanaan yang lebih baik. Selain itu, kami juga menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRIK SUMARYANA, MT
NIP. 19720324 1992031 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-3

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-6

1.4 Sistematika Penulisan..... I-7

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... II-1

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... II-8

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-14

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan II-16

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... II-17

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... II-17

2.2.2 Isu Strategis..... II-19

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 III-1

3.2 Strategis III-4

3.3 Arah Kebijakan III-8

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... IV-11

BAB V : PENUTUP V-17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Personil dan Tata laksana BAPPERIDA Kabupaten Temanggung.....	II-8
Tabel 2.2. Aset dan Modal Penunjang Kinerja.....	II-10
Tabel 2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-14
Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II-16
Tabel 2.6. Permasalahan dan Isu Strategis	II-19
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA.....	III-3
Tabel 3.4. Pentahapan Renstra BAPPERIDA	III-5
Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra BAPPERIDA	III-8
Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah	III-12
Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA	III-14
Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	III-22
Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Awal Renstra	III-31
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama	III-33
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci	III-36
Tabel 4.7. Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN).....	III-37
Tabel 4.8. Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung.....	III-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung.....	II-8
Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah	III-1
Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	III-2
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. BAPPERIDA merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan Penerapan , serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. Keberadaan BAPPERIDA menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan Penerapan , serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembangunan di bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan Penerapan , serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat .

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra BAPPERIDA tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra BAPPERIDA adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra BAPPERIDA adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BAPPERIDA adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat:

1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan renstra BAPPERIDA tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra BAPPERIDA tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)

- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat :

- 1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

- 1. Uraian program
- 2. Uraian kegiatan
- 3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif
- 4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan Peraturan, BAPPERIDA Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah, sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Badan

Badan bertugas membantu dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan berfungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang

perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;

- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya..
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

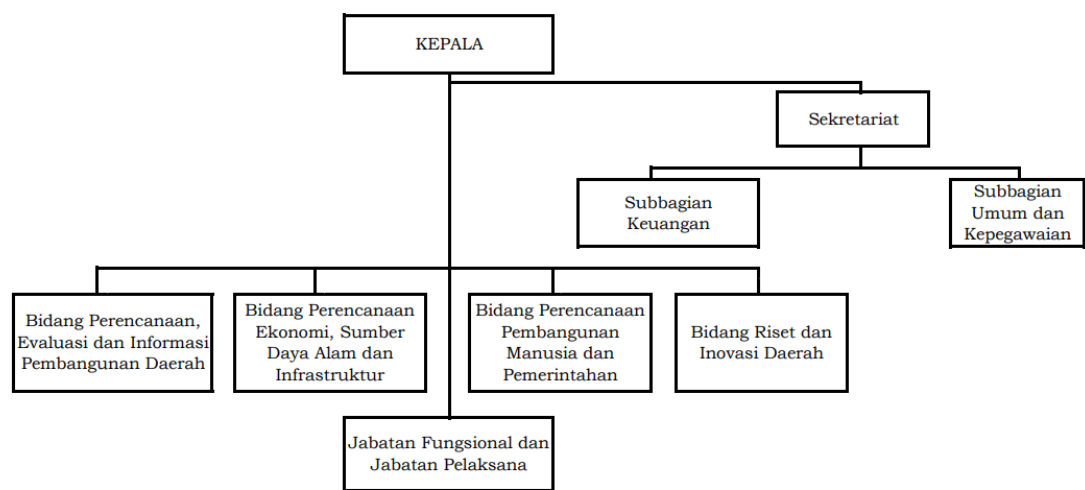
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan,

- pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - i. melaksanakan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Riset dan Inovasi Daerah. Berikut gambar struktur organisasi BAPPERIDA:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Bappeda disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Tahun 2025

NAMA JABATAN (SESU AI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1 / D 4	S 2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PI M II	PIM III	PI M IV
KEPALA BADAN							1				1				
SEKRETARIS						1					1				
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					1					1					
KASUBAG KEUANGAN					1					1					

NAMA JABATAN (SESU AI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1 / D 4	S 2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PI M II	PIM III	PI M IV
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1					1				
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH						1					1				
KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR					1					1					
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN						1					1				
NON ESELON															
Perencana Ahli Madya						1					1				
Perencana Ahli Muda					4	2				4	2				
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA					1					1					
Analisis Perencanaan					1					1					
Perencana Ahli Pertama					1 1					11					
PRANATA KOMPUTER MAHIR				1						1					
Pengelola Program dan Kegiatan				1					1						
Pengelola Data				1						1					
Bendahara	1									1					
Verifikator Keuangan				1					1						
Pengelola Keuangan				1					1						
Pengadministrasi Umum	2	1							2	1					
Pramu Bakti								1							

Sumber : Aplikasi Simpeg Bappeda Tahun 2025

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi BAPPERIDA diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan BAPPERIDA.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Tahun 2025

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit	62.503.808	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Unit	7.093.292.674	Kondisi Rusak Ringan
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	3.531.033.400	
4	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1 Unit	188.754.983	
5	Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit	58.448.690	
6	Taman Permanen	1 Unit	58.900.000	
7	Stationary Generating Set	3 Unit	253.570.000	2 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8 Unit	1.420.067.100	3 Baik 4 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
9	Sepeda Motor	20 Unit	269.593.800	6 Baik 14 Rusak Ringan
10	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	1 Unit	975.000	Baik
11	Scaffolding Set	4 Unit	3.487.175	Rusak Ringan
12	Global Positioning System	2 Unit	23.750.000	Baik
13	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	7 Unit	8.544.00	1 Rusak Ringan 6 Rusak Berat

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
14	Mesin Ketik Manual Langewagon (18- 27 Inchi)	1 Unit	2.497.000	1 Rusak Berat
15	Lemari Besi/Metal	4 Unit	8.000.000	Baik
16	Lemari Kayu	20 Unit	26.300.000	Baik
17	Rak Besi	1 Unit	1.980.000	Baik
18	Rak Kayu	21 Unit	45.167.500	2 Baik 19 Rusak Berat
19	Filing Cabinet Besi	38 Unit	55.235.000	Baik
20	Brandkas	1 Unit	9.570.000	Rusak Berat
21	Lemari Kaca	3 Unit	8.400.000	Baik
22	CCTV	5 Unit	16137000	Baik
23	White Board	2 Unit	2.200.000	Baik
24	Peta	1 Unit	157.424.896	Baik
25	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	2.791.800	Baik
26	LCD Projector/Infocus	16 Unit	171.802.395	8 Baik 6 Rusak Ringan 2 Rusak Berat
27	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2 Unit	2.700.000	Baik
28	Meja Kerja Kayu	24 Unit	62.780.000	Baik
29	Kursi Besi/Metal	13 Unit	16.940.000	Baik
30	Kursi Kayu	39 Unit	48.500. 000	Rusak Berat
31	Meja Tambahan	1 Unit	5.000.0 00	Rusak Berat
32	Meja Panjang	1 Unit	3.500.000	Baik
33	Kursi Rapat	48 Unit	110.245.900	Baik
34	Kursi Tamu	1 Unit	4.999.500	Baik
35	Kursi Biasa	44 Unit	40.205.000	14 Baik 10 Rusak Ringan 10 Rusak Berat
36	Meja Komputer	9 Unit	8.910.000	4 Baik 5 Rusak Berat
37	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3 Unit	11.884.920	Rusak Ringan
38	Mesin Pemotong Rumput	4 Unit	12.734.720	1 Baik 2 Rusak Ringan 1 Rusak Berat

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
39	Lemari Es	4 Unit	9.075.000	Baik
40	A.C. Split	40 Unit	224.114.042	15 Baik 14 Rusak Ringan 11 Rusak Berat
41	Kipas Angin	2 Unit	1.997.500	2 Rusak Berat
42	Kompor Gas (Alat Dapur)	2 Unit	1.100.000	1 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
43	Blender	1 Unit	1.070.000	Rusak Berat
44	Televisi	6 Unit	24.859.300	2 Baik 3 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
45	Loudspeaker	2 Unit	1.375.000	Rusak Berat
46	Sound System	5 Unit	72.455.500	Baik
47	Unit Power Supply	1 Unit	3.500.000	Rusak Berat
48	Tiang Bendera	1 Unit	5.022.628	Rusak Ringan
49	Tangga Aluminium	1 Unit	1.800.000	Rusak Ringan
50	Dispenser	1 Unit	999.000	Rusak Ringan
51	Mimbar/Podium	2 Unit	10.491.500	Baik
52	Handy Cam	2 Unit	22.000.525	Rusak Berat
53	Gordyin/Kray	9 Unit	24.876.000	Baik
54	Lampu	45 Unit	91.465.000	25 Baik 10 Rusak Ringan 10 Rusak Berat
55	Alat Pemadam/Portable	15 Unit	35.750.000	Baik
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	52 Unit	115.050.000	Baik
57	Meja Rapat Pejabat Eselon II	40 Unit	50.000.000	Baik
58	Meja Tamu Biasa	15 Unit	70.992.200	11 Baik 4 Rusak Berat
59	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	40 Unit	42.000.000	Baik
60	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 Unit	5.062.500	Baik
61	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1 Unit	1.500.000	Rusak Berat
62	Photo Tustel	5 Unit	39.930.000	1 Baik 4 Rusak Berat
63	Camera Digital	4 Unit	8.240.360	Baik

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
64	Video Conference	2 Unit	30.439.000	Baik
65	LCD Monitor	11 Unit	102.885.000	7 Baik 2 Rusak Ringan 2 Rusak Berat
66	Kamera Udara	1 Unit	62.190.000	Rusak Berat
67	Pesawat Telephone	11 Unit	22.000.000	Baik
68	Telephone Mobile	1 Unit	14.550.000	Baik
69	Handy Talky (HT)	5 Unit	6.556.000	Rusak Berat
70	Antena All Band	1 Unit	1.561.700	Baik
71	Tensimeter	1 Unit	1.477.900	Baik
72	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2 Unit	2.583.500	Rusak Berat
73	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	6.386.000	Rusak Berat
74	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1 Unit	18.179.000	Baik
75	TV Monitor	1 Unit	7.447.000	Baik
76	Microwave Oven	1 Unit	1.292.500	Baik
77	Sterilizer (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	1 Unit	594.000	Rusak Berat
78	Kamera Digital	1 Unit	7.502.000	Rusak Berat
79	P.C Unit	44 Unit	228.197.003	23 Baik 3 Rusak Ringan 18 Rusak Berat
80	Lap Top	35 Unit	343.674.250	22 Baik 3 Rusak Ringan 10 Rusak Berat
81	Note Book	8 Unit	69.154.300	Baik
82	Tablet PC	1 Unit	13.750.000,00	Baik
83	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	1.474.000	1 Baik
84	Monitor	2 Unit	104.400.000	Baik
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	59 Unit	143.113.373	35 Baik 4 Rusak Ringan 20 Rusak Berat
86	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4 Unit	14.905.000	2 Baik 2 Rusak Ringan
87	External/ Portable Hardisk	3 Unit	3.850.000	3 Baik

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
88	Closed Circuit Television (CCTV)	1 Unit	20.460.000	Baik

Sumber : Aplikasi Simbada

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, BAPPERIDA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	NIHIL						

Sumber : RPJMD Kab.Temanggung Tahun 2019-2023 dan RPD Kab.Temanggung Tahun 2024-2026

Bappeda tidak melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan dasar, sehingga Bappeda tidak terkait/melakukan indikator STandar Pelayanan Minimal (SPM).

2.1.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	n.a	100	100	100	100	
2	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	
3	Manajemen Risiko Indeks	100	100	100	100	100	
4	Indeks Inovasi Daerah	100	75	100	100	100	

Sumber : IKPD BAPPEDA Tahun 2024

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2024 masih sama dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 100%, menunjukkan bahwa kinerja perencanaan pembangunna daerah telah mencapai target maksimal yang ditetapkan dan berhasil dipertahankan secara konsisten dalam kurun waktu tersebut.

Capaian Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masih stagnan yaitu 100%, mengindikasikan bahwa seluruh target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam periode tersebut berhasil dicapai secara penuh.

Indikator Manajemen risiko indeks merupakan indikator baru yang tertuang dalam perubahan. Capaian kinerja Manajemen risiko indeks pada tahun 2021 sampai dengan 2024 masih stagnan yaitu 100%, hal tersebut berarti pemerintah daerah mampu memenuhi seluruh aspek yang diukur dalam indikator manajemen risiko sesuai standar yang ditetapkan sejak awal penerapannya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi capaian tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kriteria penilaian berbeda dengan tahun sebelumnya dan perlu upaya peningkatan inovasi daerah. Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 dengan melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, kriteria penilaian menggunakan skor :

- 1001 keatas : sangat inovatif
- 501 - 1000 : inovatif
- 1 - 500 : kurang inovatif
- Belum mengisi data ▪ Tidak ada data

Sedangkan penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 adalah laporan informasi data

inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan melalui proses Penjaminan Mutu oleh unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMRT CITY) Universitas Indonesia, dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai. Kriteria penilaian menggunakan skor :

- 60,00 - 100: sangat inovatif
- 30,05 - 59,99: inovatif
- 0,01 - 29,99: kurang inovatif
- 0 : tidak dapat dinilai

Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 masih sama dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 100%, yang berarti target pada Renstra telah tercapai.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
		NIHIL					

Sumber : RPD Kab.Temanggung Tahun 2024-2026

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPERIDA memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan BAPPERIDA adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
 - a. Perangkat Daerah
 - b. Instansi Pemerintah

2. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

- a. Krenova Masyarakat
- b. Krenova Perangkat Daerah
- c. Krenova Pelajar
- d. Krenova ASN

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BAPPERIDA Kabupaten Temanggung juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti akademisi, TJSLP, Lembaga Non Pemerintah, Media, LPM, Lembaga Penelitian, Magang, PKL dan lain-lain.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh BAPPERIDA antara lain:

1. Belum optimalnya ketercapaian kinerja Pembangunan daerah.
Kinerja pembangunan yang kurang optimal seringkali dimulai dari perencanaan yang tidak berbasis pada data yang akurat dan relevan. Tanpa data yang valid, prioritas pembangunan menjadi kabur dan tidak terfokus pada kebutuhan riil masyarakat. Data yang kurang update menjadi faktor penting dalam ketercapaian kinerja.
2. Infrastruktur dan fasilitas riset yang terbatas dan jumlah SDM riset dan inovasi yang terbatas sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan

perencanaan pembangunan dikarenakan pemanfaatan hasil dan inovasi membutuhkan inkubasi yang berkelanjutan serta belum optimal. Dalam pembangunan daerah penelitian dan pengembangan sangat penting untuk melihat kebutuhan, potensi serta menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor. Penelitian dan pengembangan harus terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.

3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung kualitas tata Kelola pemerintahan;

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal karena rendahnya pemahaman, kapasitas SDM terbatas, dan indikator kinerja yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan nilai SAKIP rendah, penggunaan anggaran tidak efektif, dan pelayanan publik kurang maksimal. Perlu penguatan kapasitas, indikator berbasis hasil, dan integrasi sistem untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

4. Belum optimalnya dokumen perencanaan dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi maupun kementerian/ lembaga ditingkat nasional. Dokumen perencanaan sektoral belum optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan untuk akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik.

5. Tata kelola riset dan penelitian masih belum optimal karena kurangnya regulasi yang jelas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan keterbatasan anggaran. Kapasitas SDM riset juga perlu ditingkatkan, sementara hasil riset kurang dimanfaatkan dalam kebijakan daerah. Penguatan regulasi, koordinasi, anggaran, dan kapasitas SDM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas riset dan pemanfaatannya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat

Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi BAPPERIDA. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan komponen penting dalam peningkatan layanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan 2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan membantu menciptakan kebijakan yang lebih merepresentasikan kebutuhan dan harapan masyarakat	1. Belum optimalnya ketercapaian kinerja pembangunan daerah 2. Infrastruktur dan fasilitas riset yang terbatas dan jumlah SDM riset dan inovasi yang terbatas 3. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan perencanaan Pembangunan 4. Masih adanya ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	1. Riset Pembangunan Daerah 2. Inovasi Daerah 3. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Kualitas layanan BAPPERIDA Akuntabilitas Kinerja Bappeda

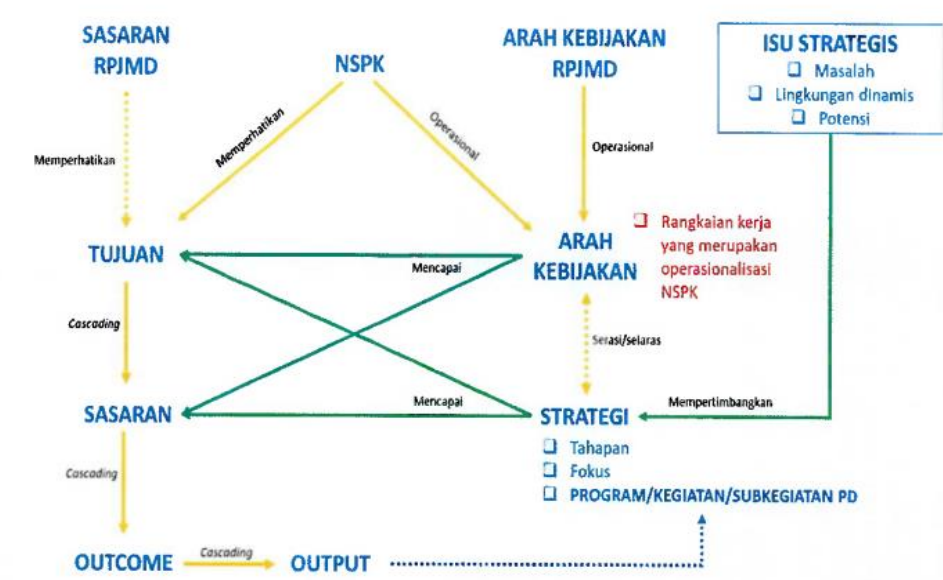
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

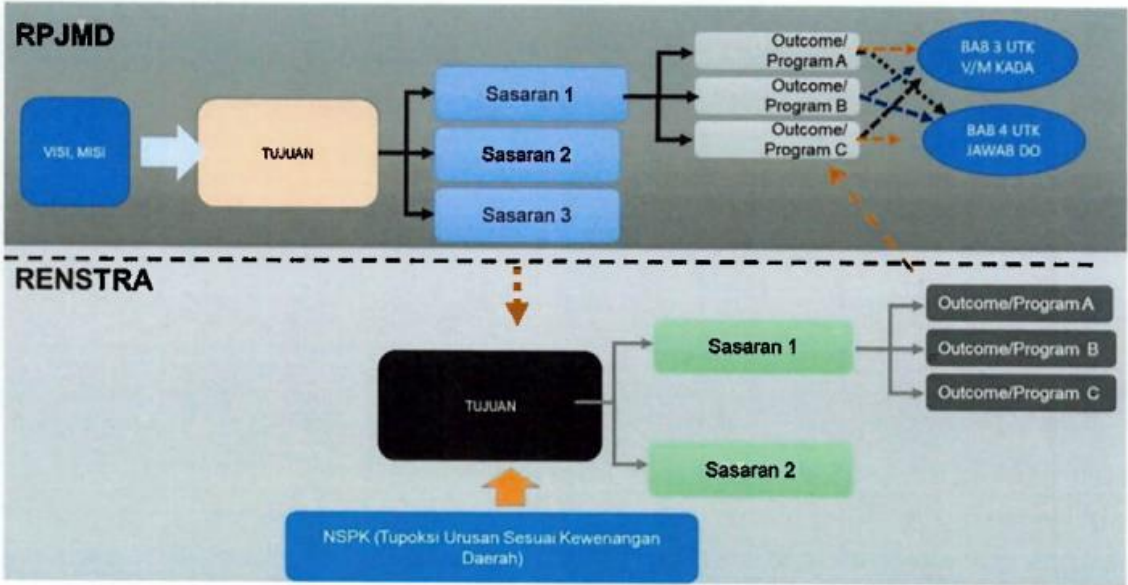
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan BAPPERIDA diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPERIDA.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3III
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		Indeks perencanaan pembangunan daerah (Angka)	4,5	81,00	82,20	83,40	84,60	85,80	87,00	
			Indeks Inovasi Daerah (Nilai)	72,42	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP (Nilai)	-	21,20	21,30	21,40	21,50	21,60	21,70	
			Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Nilai)	-	85	87	89	91	93	95	
			Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Indeks)	3,002	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Kapabilitas Inovasi (Angka)	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	-	88,26	88,28	88,30	88,32	88,34	88,36	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	-	83,65	83,75	83,85	83,95	84,05	84,15	

Ket : Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh BAPPERIDA dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Renstra Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi BAPPERIDA tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra BAPPERIDA

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan pondasi pengelolaan riset daerah melalui regulasi, SDM dan kelembagaan	Penguatan database dan digitalisasi informasi riset daerah	Penguatan sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan riset dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri	Peningkatan pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset	Penguatan budaya dan ekosistem riset yang kolaboratif
Penguatan pondasi pengelolaan inovasi daerah melalui regulasi, SDM dan kelembagaan	Penguatan database dan digitalisasi informasi inovasi daerah	Penguatan sinergi dan kolaborasi pengembangan inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri	Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi inovasi	Penguatan budaya dan ekosistem inovasi yang kolaboratif
1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Penataan internal 1. evaluasi terhadap pelayanan dan kinerja 2. penataan SOP	Digitalisasi dasar 1. Optimaslisasi SIPD 2. penerapan pelayanan digital	Integrasi dan kolaborasi 1. integrasi lintas sektor dan PD 2. penguatan kemintraan	Inovasi layanan	Tanformasi layanan dari media konvensional menjadi media digital

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
3. Penguatan SDM:pelatihan perencanaan dan pelayanan publik	3. pembukaan dsbord kinerja program bappeda ke publik			
Penguatan dasar teknis dan penyelarasan internal : 1. Menyusun pedoman teknis internal penyusunan dokumen kinerja (Renstra, Renja, PK, Rencana Aksi, SKP, LKjIP) sesuai prinsip SAKIP dan cascading. 2. Membentuk Tim Penjamin Kualitas Kinerja dan SOP review LKjIP internal. 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pembahasan dan reuiu kinerja. 4. Melakukan pelatihan penyusunan LKjIP berkualitas untuk seluruh pejabat fungsional/perencana.	Penyeragaman dokumen dan peningkatan keterpaduan system : 1. Mengembangkan format LKjIP yang memenuhi seluruh unsur sistematika dan kualitas pelaporan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB. 2. Menyusun glosarium indikator kinerja dan definisi operasional untuk menghindari perbedaan tafsir. 3. Mengembangkan dashboard pemantauan capaian indikator kinerja strategis Bappeda. 4. Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan diunggah tepat waktu ke website PPID.	Memastikan kebermanfaatan laporan kinerja sebagai alat perbaikan : 1. Menyusun template reuiu berjenjang untuk pelaporan kinerja internal. 2. Membuat mekanisme korelasi antara capaian kinerja dan efisiensi anggaran. 3. Meningkatkan kualitas IKPD triwulanan agar digunakan dalam penyesuaian kegiatan (Renja dan DPA). 4. Membangun budaya kerja berbasis hasil melalui forum evaluasi kinerja triwulan.	Peningkatan kualitas LKjIP dengan pembanding eksternal dan inovasi : 1. Menyusun benchmark capaian kinerja dengan perangkat daerah sejenis di daerah lain (misal, Bappeda Kabupaten dengan nilai AA). 2. Mengembangkan format LKjIP yang menyajikan perbandingan dengan standar nasional/internasional 3. Mendorong inovasi dalam pelaporan, misalnya dalam bentuk visualisasi capaian kinerja, infografik, dan storytelling data.	Memastikan keberlanjutan dan replikasi praktik terbaik : 1. Mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh prosedur baku penyusunan dokumen kinerja berkualitas. 2. Menyusun laporan praktik baik (best practices) pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			4. Mengembangkan sistem feedback internal dari stakeholder BAPPERIDA atas dokumen kinerja.	

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan BAPPERIDA tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra BAPPERIDA

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	BAPPERIDA Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi Badan	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja BAPPERIDA a. Peningkatan sistem pengendalian Intern Perangkat Daerah b. Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah - Perencanaan berbasis kinerja - Penguatan sistem evaluasi dan monitoring kinerja pembangunan - Implementasi Manajemen Risiko dalam perencanaan - Tata Kelola kelembagaan dan layanan yang transparan - Pelaporan, pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja c. Peningkatan akuntabilitas kinerja BAPPERIDA d. Peningkatan kualitas dan pemafaatan laporan kinerja instansi pemerintah e. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	
		2. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik a. Peningkatan tata Kelola dan layanan informasi public	2. Peningkatan kualitas pelayanan BAPPERIDA a. Peningkatan standar pelayanan Digitalisasi	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
		3. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan public a. Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan public b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan public	3. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan BAPPERIDA a. Pengembangan inovasi daerah • Penyederhanaan proses dan inovasi pelayanan • Penguatan ekosistem riset dan inovasi • Optimalisasi peran perangkat daerah dalam menciptakan dan mengelola inovasi • Peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi b. Mewujudkan riset Pembangunan daerah • Integrasi hasil riset kedalam perencanaan Pembangunan • Penguatan SDM dan Kelembagaan c. Peningkatan Kompetensi SDM • Penguatan partisipasi dan kepuasan masyarakat pelayanan • Penguatan pengawasan dan pengaduan layanan • Penerapan Zona Integrasi menuju WBK dan WBBM • Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan • Peningkatan kapasitas SDM terkait pelayanan prima	

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah, terdapat beberapa masukan antara lain:

- 1) Perlu adanya kerjasama antara BAPPERIDA dengan TJSLP serta KADIN dan HIPMI dalam rangka *business matching* untuk pengembangan produk Temanggung. Dengan adanya *business matching* diharapkan pengusaha di Temanggung dapat lebih berkembang dan maju sehingga TJSLP dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pembangunan Kabupaten Temanggung.

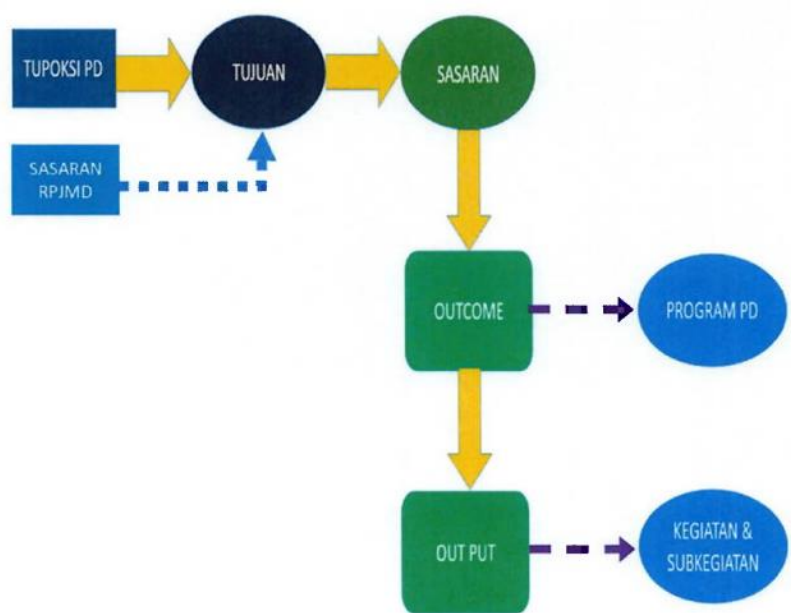
- 2) Keberlanjutan program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan.
- 3) Urusan riset dan inovasi menjadi tugas dari BAPPERIDA.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang sudah ditetapkan maka dilakukan manajemen risiko yang menjadi lampiran dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahapan penilaian risiko, yaitu:

- 1) penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah;
- 2) identifikasi risiko dengan melihat proses bisnis dengan regulasi yang ada;
- 3) analisis risiko;
- 4) kekuatan pengendalian;
- 5) informasi dan komunikasi; dan
- 6) pemantauan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan BAPPERIDA sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN					6.864.412.838		6.915.917.943		7.025.470.711		7.228.630.414		7.206.086.631	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.113.808.838		6.164.788.520		6.263.900.589		6.452.742.773		6.429.655.870	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	6.113.808.838	100	6.164.788.520	100	6.263.900.589	100	6.452.742.773	100	6.429.655.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					350.000.000		350.245.000		355.113.406		361.789.538		362.042.790	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	-	-	90	350.000.000	92	350.245.000	94	355.113.406	96	361.789.538	98	362.042.790	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko (%)	-	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	-	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					400.604.000		400.884.423		406.456.716		414.098.103		414.387.971	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	-	85	88	133.534.668	91	133.628.143	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.323	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sum ber daya Alam	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA (%)	-	85	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur (%)	-	85	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					260.000.000		260.182.000		263.798.530		268.757.942		268.946.073	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					53.000.000		53.037.100		53.774.316		54.785.273		54.823.623	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (%)	-	50	60	53.000.000	70	53.037.100	80	53.774.316	90	54.785.273	100	54.823.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					207.000.000		207.144.900		210.024.214		213.972.669		214.122.450	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis (%)	-	50	50	207.000.000	50	207.144.900	50	210.024.214	50	213.972.669	50	214.122.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase inovasi yang dimanfaatkan (%)	-	50	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					7124412838.00		7176099943.00		7289269241.00		7497388356.00		7475032704.00	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				Indeks perencanaan pembangunan daerah (Angka)		
					Indeks Inovasi Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP (Nilai)		
					Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Nilai)		
					Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Indeks)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tersusunnya Dokumen Pelaporan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pengelolaan risiko yang ditindaklanjuti	Tersusunnya Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber daya Alam	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		Kapabilitas Inovasi (Angka)		
					Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
					Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Persentase inovasi yang dimanfaatkan (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terterselenggaranya Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terwujudnya Inovasi dan inovasi daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Tabel 4.3
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				6.864.412.838		6.915.917.943		7.025.470.711		7.228.630.414		7.206.086.631		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.113.808.838		6.164.788.520		6.263.900.589		6.452.742.773		6.429.655.870		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	6.113.808.838	100	6.164.788.520	100	6.263.900.589	100	6.452.742.773	100	6.429.655.870	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.310.408.838		5.341.888.520		5.369.888.520		5.543.249.780		5.543.262.877		
Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	5.310.408.838	45	5.341.888.520	45	5.369.888.520	45	5.543.249.780	45	5.543.262.877		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.310.408.838		5.341.888.520		5.369.888.520		5.543.249.780		5.543.262.877		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	5.310.408.838	45	5.341.888.520	45	5.369.888.520	45	5.543.249.780	45	5.543.262.877		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.000.000		69.500.000		84.500.000		92.000.000		89.500.000		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	66.000.000	2	69.500.000	2	84.500.000	2	92.000.000	2	89.500.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.500.000		5.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.000.000		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000		12.500.000		13.500.000		14.500.000		14.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.000.000	1	12.500.000	1	13.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000		
5.01.01.2.08.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000		
5.01.01.2.08.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		48.000.000		60.000.000		65.000.000		63.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15	45.000.000	15	48.000.000	15	60.000.000	15	65.000.000	15	63.000.000		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				576.400.000		586.400.000		623.512.069		631.492.993		620.892.993		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	576.400.000	1	586.400.000	1	623.512.069	1	631.492.993	1	620.892.993		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.000.000		120.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	115.000.000	12	120.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	30.000.000	6	30.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				430.900.000		435.900.000		463.012.069		470.992.993		460.392.993		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	430.900.000	12	435.900.000	12	463.012.069	12	470.992.993	12	460.392.993		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.500.000		165.500.000		184.500.000		184.500.000		174.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	159.500.000	27	165.500.000	27	184.500.000	27	184.500.000	27	174.500.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				124.500.000		125.500.000		134.500.000		134.500.000		124.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	124.500.000	27	125.500.000	27	134.500.000	27	134.500.000	27	124.500.000		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	35.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				350.000.000		350.245.000		355.113.408		361.789.538		362.042.790		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	-	75	350.000.000	80	350.245.000	85	355.113.408	90	361.789.538	95	362.042.790	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah (%)	-	90		92		94		96		98			
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko (%)	-	55		60		65		70		75			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				305.000.000		305.245.000		310.113.408		314.789.538		315.042.790		
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	2	305.000.000	2	305.245.000	2	310.113.408	2	314.789.538	2	315.042.790		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	6	4		4		4		4		4			
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		42.000.000		42.000.000		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	42.000.000	2	42.000.000		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				265.000.000		265.245.000		270.113.408		272.789.538		273.042.790		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	6	4	265.000.000	4	265.245.000	4	270.113.408	4	272.789.538	4	273.042.790		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	6	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	6	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pengelolaan risiko yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	4	12.000.000		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	4	12.000.000		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				400.604.000		400.884.423		406.456.716		414.098.103		414.387.971		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur (%)	-	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				133.534.666		133.628.140		135.485.572		138.032.701		138.129.324		
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	2	133.534.666	2	133.628.140	2	135.485.572	2	138.032.701	2	138.129.324		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				121.534.666		121.628.140		122.485.572		123.532.701		123.629.324		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	2	121.534.666	2	121.628.140	2	122.485.572	2	123.532.701	2	123.629.324		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				12.000.000		12.000.000		13.000.000		14.500.000		14.500.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	3	12.000.000	3	12.000.000	3	13.000.000	3	14.500.000	3	14.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	-	88	133.534.668	91	133.628.143	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.323		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				133.534.668		133.628.143		135.485.572		138.032.701		138.129.323		
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	66	133.534.668	66	133.628.143	66	135.485.572	98	138.032.701	67	138.129.323		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	7		7		7		6		6			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	11		11		10		16		11			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				56.934.668		57.028.143		58.485.572		59.032.701		59.129.323		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	66	56.934.668	66	57.028.143	66	58.485.572	98	59.032.701	67	59.129.323		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		8.500.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.500.000	5	8.500.000		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				60.600.000		60.600.000		61.000.000		62.000.000		62.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	11	60.600.000	11	60.600.000	10	61.000.000	16	62.000.000	11	62.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		8.500.000		
Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	7	8.000.000	7	8.000.000	7	8.000.000	6	8.500.000	6	8.500.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sum ber daya Alam	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA (%)	-	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				133.534.666		133.628.140		135.485.572		138.032.701		138.129.324		
Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	133.534.666	2	133.628.140	2	135.485.572	2	138.032.701	2	138.129.324		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	6		6		6		6		6			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				91.034.666		91.128.140		92.485.572		93.532.701		93.629.324		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	91.034.666	2	91.128.140	2	92.485.572	2	93.532.701	2	93.629.324		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				10.500.000		10.500.000		10.500.000		11.000.000		11.000.000		
Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	6	10.500.000	6	10.500.000	6	10.500.000	6	11.000.000	6	11.000.000		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				32.000.000		32.000.000		32.500.000		33.500.000		33.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.500.000	1	33.500.000	1	33.500.000		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				260.000.000		260.182.000		263.798.530		268.757.942		268.946.073		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				53.000.000		53.037.100		53.774.316		54.785.273		54.823.623		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (%)	-	60	53.000.000	70	53.037.100	80	53.774.316	90	54.785.273	100	54.823.623	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				50.000.000		49.237.100		49.474.316		49.985.273		50.023.623		
Terlaksananya Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	4	3	50.000.000	3	49.237.100	3	49.474.316	3	49.985.273	3	50.023.623		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				50.000.000		49.237.100		49.474.316		49.985.273		50.023.623		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	4	3	50.000.000	3	49.237.100	3	49.474.316	3	49.985.273	3	50.023.623		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				3.000.000		3.800.000		4.300.000		4.800.000		4.800.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	2	1	3.000.000	1	3.800.000	1	4.300.000	1	4.800.000	1	4.800.000		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				3.000.000		3.800.000		4.300.000		4.800.000		4.800.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	2	1	3.000.000	1	3.800.000	1	4.300.000	1	4.800.000	1	4.800.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				207.000.000		207.144.900		210.024.214		213.972.669		214.122.450		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase inovasi yang dimanfaatkan (%)	-	60	207.000.000	70	207.144.900	80	210.024.214	90	213.972.669	100	214.122.450	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis (%)	-	50		50		50		50		50			
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				111.000.000		113.144.900		113.024.214		118.972.669		119.122.450		
Terlaksananya Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	-	2	111.000.000	2	113.144.900	2	113.024.214	2	118.972.669	2	119.122.450		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				111.000.000		113.144.900		113.024.214		118.972.669		119.122.450		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	-	2	111.000.000	2	113.144.900	2	113.024.214	2	118.972.669	2	119.122.450		
5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi				96.000.000		94.000.000		97.000.000		95.000.000		95.000.000		
Terwujudnya Inovensi dan inovasi daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	-	2	96.000.000	2	94.000.000	2	97.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	-	2				2				2			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	-	1				1				1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	-	1				1				1			
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				15.000.000		22.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	-	1	15.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000		
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual				5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	-	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				8.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	-	2	8.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				68.000.000		55.000.000		58.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	-	2	68.000.000	2	55.000.000	2	58.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000		

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Awal Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber daya Alam	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									
2.	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Angka	4,5	81,00	82,20	83,40	84,60	85,80	87,00	
3.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	72,42	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	
4.	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	
5.	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	-	21,20	21,30	21,40	21,50	21,60	21,70	
6.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	-	88,26	88,28	88,30	88,32	88,34	88,36	
7.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	-	83,65	83,75	83,85	83,95	84,05	84,15	
8.	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	-	85	87	89	91	93	95	
9.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	3,002	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa BAPPERIDA terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu:

a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib, Perencanaan pembangunan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Guna memastikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berkualitas serta mampu menyelesaikan permasalahan Pembangunan.

b. Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Kapabilitas Inovasi

Gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

- d. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP
Nilai ini berkontribusi pada penilaian kinerja instansi pemerintah. Nilai ini dihitung berdasarkan beberapa sub komponen, yaitu perencanaan strategis, perencanaan tahunan dan lain-lain.
- e. Nilai IKM Perangkat Daerah
IKM merupakan instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Penggunaan IKM sebagai indikator utama mencerminkan orientasi pembangunan yang berfokus pada masyarakat, sesuai dengan prinsip *good governance* dan pelayanan publik.
- f. Nilai AKIP Perangkat Daerah
AKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian AKIP menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah, termasuk daerah, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara sistematis dan transparan.
- g. Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Nilai capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.
- h. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu: Perencanaan (Kualitas Perencanaan), Kapabilitas (Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko) dan hasil (Aktivitas Penanganan Risiko dan Outcomes).

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Bappeda tidak terdapat Indikator Kunci.

Tabel 4.7
 Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Program Strategis Nasional
 (Pro SN)

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
NIHIL								

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan tahun berjalan, terlihat bahwa dukungan BAPPERIDA terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro SN) masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak masuknya Pro SN dalam dokumen RKPD, serta belum terintegrasinya indikator kinerja Pro SN dalam perencanaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Tabel 4.8
 Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME	KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	NIHIL				

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan program tahun berjalan, diketahui bahwa tidak terdapat program delegasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan belum optimalnya koordinasi lintas level pemerintahan dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah strategis melalui peningkatan komunikasi, sinkronisasi perencanaan, serta pengusulan kegiatan potensial yang dapat didelegasikan kepada kabupaten.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan BAPPERIDA untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan BAPPERIDA untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA BAPPERIDA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA BAPPERIDA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan BAPPERIDA dan atau target kinerja sasaran BAPPERIDA.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BAPPERIDA yang dijabarkan dalam Renja dan RKA BAPPERIDA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) BAPPERIDA. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja BAPPERIDA dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra BAPPERIDA ini.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
NIP. 19720324 1992031 1 003

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PROSES BISNIS	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
TUJUAN: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman SASARAN: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah										
	SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Evaluasi Kinerja Perencanaan	Risiko Kebijakan	Tujuan startegis tidak dapat diukur secara SMART	RKBJ.RSO.25.36.28.01	16	1. SDM penyusun kurang paham tentang SMART 2. Penyusunan tidak berbasis data 3. Belum ada pohon kinerja beserta CSF	1. Kinerja tidak dapat diukur 2. Evaluasi tidak tepat 3. Nilai SAKIP rendah	Perbaiki indikator agar SMART pada dokumen perencanaan (RPJMD 2025-2029, Renstra PD 2025-2029, Renja PD Tahun 2026)	Kepala Bappeda	2025-2029
				Risiko Fraud/Kecurangan	Manipulasi data capaian Kinerja	RF.RSO.25.36.28.03	3	Menutupi kinerja PD yang belum tercapai	1. Nilai SAKIP PD naik 2. Masyarakat belum merasakan dampaknya pembangunan	1. Meningkatkan kordinasi dengan kepala PD 2. Mengoptimalkan pelaksanaan desk IKU PD 3. Peningkatan pembinaan intern pada verifikator	Kepala Bappeda	2025-2029
			Penguatan Kapasitas SDM	Risiko Fraud/Kecurangan	Narasumber yang tidak kompeten	RF.RSO.25.36.28.11	1	1. Proses pemilihan narasumber tidak obyektif 2. Kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap substansi materi 3. Anggaran terbatas	1. Peserta tidak mendapatkan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan 2. Kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan evaluasi 3. Pemborosan anggaran	Melakukan evaluasi pasca pelatihan		2025-2029
			Penyusunan Perencanaan Kinerja yang Berkualitas	Risiko Fraud/Kecurangan	Pelaporan kinerja yang tidak sesuai realisasi	RF.RSO.25.36.28.18	3	1.Tidak ada verifikasi data 2. Tim penilai laporan kinerja (SAKIP PD) hanya dilaksanakan oleh inspektorat saja 3. Pelaporan kinerja dianggap hanya formalitas	Dokumen pelaporan kinerja tidak akurat	1.Meningkatkan pemahaman OPD bahwa pelaporan kinerja 2. Mengembangkan aplikasi PENA KITA		2025-2029
			Koordinasi dan Intergrasi Lintas PD	Risiko Kebijakan	Tidak ada pedoman/ mekanisme koordinasi lintas PD	RKBJ.RSO.25.36.28.22	16	1. Belum tersusunnya SOP koordinasi lintas PD 2. Belum optimalnya peran koordinator perencanaan	1. Rencana Kerja antar PD tidak terintegrasi 2. Terjadi tumpang tindih program 3. Kualitas perencanaan rendah	Melaksanakan rapat koordinasi antar PD		

				Risiko Kepatuhan	Belum optimalnya PD terhadap koordinasi perencanaan	RKPT.RSO.25.36.28.23	16	1. Kurang pemahaman pentingnya koordinasi 2. Tidak ada mekanisme koordinasi yang jelas	1. Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dengan regulasi 2. Penilaian SAKIP dan RB rendah 3. Target kinerja daerah tidak tercapai	Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan dan evaluasi		
				Risiko Fraud/Kecurangan	Minimnya transparansi antar PD	RF.RSO.25.36.28.24	16	1. Lemahnya pengendalian perencanaan 2. Tidak ada keterbukaan antar PD 3. Kurangnya transparansi partisipasi publik dalam perencanaan	1. Tmpang tindak program 2. Kegiatan fiktif tetap terbiayai 3. Manipulasi capaian kinerja	Melaksanakan desk capaian program kegiatan		
				Risiko Pemangku Kepentingan	Belum optimalnya kemitraan antara PD dengan pihak external	RPK.RSO.25.36.28.25	16	1. Ketidakjelasan peran dan tanggungjawab dalam kerjasama 2. Musrenbang,forum PD tidak dioptimalkan	1. Program kerjasama tidak berjalan secara efektif 2. Hilangnya peluang dukungan dari pihak external	Menjajaki peluang kerjasama dengan non-pemerintahan		
				Risiko Operasional	Terganggunya proses perencanaan	RO.RSO.25.36.28.26	16	1. Ketidak hadirn PD dalam forum perencanaan 2. Rendahnya SDM perencanaan di masing-masing PD 3. Data yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu	1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan 2. Ketidak sesuai program 3. Banyaknya revisi dokumen dari hasil reuiu	Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan PD		
				Risiko Bencana	Lambatnya koordinasi dalam perencanaan	RB.RSO.25.36.28.27	16	1.Kurangnya sinkronisasi antar PD 2. Informasi yang tidak akurat	1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan 2. Program tidak sinkron 3. Penyusunan program/kegiatan tidak tepat sasaran 4. Ketidakharmonisan antar PD	Melaksanakan desk program kegiatan di Renja PD		
			Monitoring dan Evaluasi Berkala	Risiko Kebijakan	Monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan secara konsisten	RKBJ.RSO.25.36.28.28	16	1. Tidak ada jadwal monev yang tepat 2. Krangnya SDM monev	1. Data tidak akurat 2. Prmasalahan tidak teridentifikasi	1. Mengoptimalkan penyggunaan teknologi 2. Meningkatkan kapasitas dan menambah SDM monev		2025-2029
				Risiko Fraud/Kecurangan	Laporan monev fiktif	RF.RSO.25.36.28.31	1	1. Pengawasan monev yang tidak optimal 2,. Lemahnya sistem pelaporan 3. Monev hanya laporan fiktif	1. Data tidak akuratx 2. Kebijakan yang salah sasaran 3. Potensi penyalahgunaan anggaran	1. Menggunakan sistem digital dashboard untuk memantau hasil monev secara real-time 2. Membuat SOP format pelaporan (foto, dokumen, laporan) 3. Memberlakukan sanksi administratif untuk laporan yang terbukti fiktif		2025-2029
			Pelaporan dan Dokumentasi Kinerja	Risiko Fraud/Kecurangan	Menyusun laporan kinerja PD (LKJiP) berdasarkan asumsi, bukan data	RF.RSO.25.36.28.37	7	1. Keterbatasan data 2. Kurang pemahaman pentingnya data 3. Belum terbentuk tim (PD terkait) verifikasi laporan kinerja 4. Laporan kinerja masih manual	1. Laporan kinerja (LKJiP) tidak akurat 2. Laporan tidak dapat dopertanggungjawabkan 3. Tidak terjadi perbaikan kinerja berkelanjutan	1. Melakukan verifikasi silang antar PD Penyusun, Bappeda, Inspektorat 2. menetapkan mekanisme review internal		2025-2026

				Risiko Operasional	Terjadi keterlambatan dalam penyelesaian laporan	RO.RSO.25.3 6.28.39	16	1. Keterlambatan dari peyusun 2. Kominikasi lemah 3. Rendahnya SDM penyusun	Laporan tidak disampaikan teat waktu	1. Memberikan sanksi administratif jika melewati batas waktu 2. Menetapkan timeline dan deadline penyusunan laporan sejak awal tahun (termasuk dengan SK Penyusunannya) 3. Melaksanakan pelatihan teknis penyusna laporan berbasis evidence dan kinerja		2025-2026
		Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	Risiko Fraud	Penyusunan RKPd berdasarkan intervensi pihak luar	RF.RSO.25.3 6.28.43	1	1. Lemahnya sistem pengendalian internal 2. Tidak ada sistem validasi dan verifikasi data 3. Kepentingan politik	1. Program dan kegiatan tidak tepat sasaran 2. Anggaran tidak efisien 3. Menurunnya kepercayaan publik	1. Menetapkan kewajiban pelibatan stakeholder 2. Menggunakan platform digital sebagai opsi dalam pelibatan masyarakat		2025-2026
				Risiko Operasional	Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	RO.RSO.25.3 6.28.45	16	1. Belum optimalnya monitoring dan reviu inetrnal 2. Tidak ada updating data yang berkelanjutan	1. Capaian kinerja tidak sesuai target 2. Evaluasi pembangunan menjadi bias	1. Menyusun SOP Monitoring & reviu internal secara periodik 2. Membuat SOP Pengelolaan data pembangunan		2025-2026
			Penjabaran Rencana kerja dalam dokumen perencanaan	Risiko Kebijakan	Tidak konsistennya kebijakan lintas dokumen perencanaan	RKBJ.RSO.25 .36.28.47	16	1. Kurangnya koordinasi antar tim dan penyusun dok perencanaan 2. Tidak ada kontrol dari tim terkait keselarasan dokumen perencanaan	capaian kinerja tidak sesuai target strategis	1. Menentukan PIC di setiap tim 2. Membuat checklist kesesuaian antar dokumen		2025-2026
				Risiko Fraud	Manipulasi alokasi anggaran dalam RKA	RF.RSO.25.3 6.28.49	1	1. Kepentingan pribadi atau kelompok 2. Lemahnya pengawasan internal	1. Program satu kegiatan tidak sesuai kebutuhan masyarakat 2. Penggunaan anggaran tidak efisien 3. Ada potensi korupsi	Melaksanakan desk/reviu dalam proses penyusunan RKA		2025-2029
			Pelaksanaan program pembangunan	Risiko Fraud	Penggelembungan harga dalam pelaksanaan kegiatan	RF.RSO.25.3 6.28.55	1	1. Lemahnya pengawasan pengadaan 2. Kolusi antara pelaksana dan rekanan	Kerugian keuangan daerah	1. Rotasi pejabat pengadaan secara berkala untuk mengurangi konflik kepentingan.		2025-2029
			Pengukuran IKU	Risiko Fraud	rekayasa indikator pengukuran IKU	RF.RSO.25.3 6.28.61	1	intervensi pihak tertentu	1. IKU tidak sesuai kerja nyata 2. Pengambilan kebijakan tidak tepat			
			Evaluasi dan Analisis capaian IKU	Risiko Fraud	Manipulasi hasil evaluasi	RF.RSO.25.3 6.28.67	1	Tidak transparan dalam metodologi evaluasi.	1. risiko temuan Inspektorat/BPK 2. penurunan akuntabilitas.	Memperkuat sistem pelaporan berbasis digital		2025-2029

		Manajemen Risiko Indeks	Penyusunan laporan	Risiko Kebijakan	Dokumen RTP Strategis tidak mengacu pada pedoman BPKP dan perbup no 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten temanggung	RKBJ.RSO.25.36.28.71	3	- Kurangnya pemahaman pada pedoman BPKP dan perbup no 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten temanggung di tingkat perangkat daerah - Sosialisasi perbup no 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten temanggung di perangkat daerah belum maksimal - Standar format belum sesuai dengan ketentuan - Dokumen disusun hanya formalitas	- Dokumen RTP tidak falid - Pengelolaan risiko menjadi tidak efektif - Terdapat riviui dari inspektorat - Meningkatkan risiko strategis	- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan penyusunan RTP - Penyusunan RTP dengan mengacu pedoman dari BPKP dan Perbup no 7 tahun 2022 - Proses penyusunan RTP berdasarkan tahapan-tahapan pada kertas kerja - Penyusunan dokumen laporan tahunan - Memperbaharui pedoman penyusunan RTP		2025-2029
		Manajemen Risiko Indeks		Risiko Fraud	Dokumen tidak melaporkan risiko strategi	RF.RSO.25.36.28.74	10	1. Kurang pemahaman penyusun 2. Takut akan berkaitan dengan hukum 3. Budaya organisasi yang tidak transparan 4. Minimnya pelatihan 5. Perbup yang belum diperbaharui	1. Kegagalan pelaksanaan kegiatan/pembangunan 2. Hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan 3. Kerugian keuangan	1. Revisi kebijakan 2. Pelatihan 3. Deteksi risiko strategis sejak dini		2025-2029
				Risiko Operasional	Kurangnya pemahan SDM unit pemilik risiko sehingga dokumen RTP strategis tidak dikelola serius	RO.RSO.25.36.28.76	16	- Pelaksanaan sosialisasi RTP yang belum optimal - Budaya sadar resiko yang belum kuat - Belum maksimalnya asistensi pendampingan dalam penyusunan RTP - Keterlibatan pimpinan unit kerja atas pelaksanaan pengelolaan risiko	- Dokumen RTP tidak sesuai dengan kondisi nyata - Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah pada dokumen RTP	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala		2025-2029
			Pemantauan risiko	Risiko Fraud	menyembunyikan data yang berpotensi risiko tinggi	RF.RSO.25.36.28.80	14	1. kurangnya integritas SDM 2. adanya tekanan untuk menyembunyikan data agar unit kerja terlihat baik	1. risiko aktual tidak terungkap sehingga menimbulkan kerugian yang besar 2. potensi konsekuensi hukum yang merusak reputasi unit kerja	1. peningkatan sistem kontrol internal dan transparansi dalam pemantauan risiko 2. peningkatan pengawasan dari pimpinan		2025-2029
	SASARAN 2: Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Kapabilitas Inovasi	Pemanfaatan riset dan inovasi pembangunan daerah	Risiko Kebijakan	Kebijakan pembangunan daerah yang belum memanfaatkan riset dan inovasi	RKBJ.RSO.25.36.28.84	17	anggaran pemanfaatan riset dan inovasi belum menjadi prioritas	pembangunan daerah tidak sesuai bukti nyata di lapangan	1. Alokasi anggaran tetap dalam APBD 2. Diversifikasi sumber pembiayaan (CSR, kerja sama dengan lembaga litbang pusat dan daerah lain)		

				Risiko Fraud	Perhitungan nilai kapabilitas inovasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian Lembaga tanpa ada konfirmasi kepada Pemerintah Daerah	RF.RSO.25.3 6.28.86	13	Belum ada transparansi data sekunder yang digunakan BRIN dalam melakukan perhitungan	Kelemahan indikator-indikator yang mendukung capaian nilai kapabilitas inovasi daerah tidak dapat diidentifikasi secara maksimal	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BRIDA Prov Jateng dan BRIN		
			Kompetensi SDM Pelayanan	Risiko Fraud	Manipulasi penilaian dalam seleksi administrasi krenova	RF.RSO.25.3 6.28.98	17	1. Tidak adanya sistem penilaian yang transparan dan terdokumentasi 2. Belum ada tim verifikasi seleksi dari luar 3. Penilai mempunyai relasi dengan peserta 4. Ada tekanan dari pihak luar 5. Mekanisme pengaduan yang belum optimal	1. Terpilihnya inovasi yang tidak layak 2. Tersingkirnya inovasi yang lebih baik 3. Penurunan kepercayaan publik terhadap kegiatan krenova 4. Citra negatif terhadap penyelenggara	1. Menerapkan sistim penilaian yang transparansi dan terdokumentasi melalui media sosial 2. Membentuk tim verifikasi dan penilai independen 3. Mengoptimalkan sistim pengaduan melalui aplikasi lintang asmara 4. Membuat Pakta integritas yang ditandatangani oleh tim penilai		
				Risiko Operasional	SDM pelayanan yang lambat atau terhambat	RO.RSO.25.3 6.28.100	16	1. SDM tidak memahami SOP atau alur pelayanan 2. Tidak terlatih menggunakan sistem online 3. Kurang paham atas batas waktu pelayanan	1. Pemohon kecewa 2. Aduan masyarakat meningkat	1. Sosialisasi SP secara berkala 2. Pendampingan (coaching) bagi pegawai yang kesulitan dengan sistem online		
			Penyediaan sarpras pelayanan	Risiko Kepatuhan	Tidak ada pelaporan dan evaluasi penggunaan sarpras secara berkala	RKPT.RSO.25 .36.28.103	16	Belum ada SOP monitoring penggunaan sarpras	Sarpras rusak dan disalahgunakan	1. Menyusun SOP movev sarpras 2. Membuat sistem pencatatan pelaporan		
				Risiko Fraud	Mark up pengadaan sarpras yang dilakukan oleh pegawai Bappeda	RF.RSO.25.3 6.28.104	17	1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian intern 2. Ketidapkahaman proses administrasi	1. Kerugian keuangan daerah 2. Menurunkan kredibilitas dan integrtitas Bappeda	1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM 2. Memperkuat pengawasan dan pengendalian intern 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-purchasing/e-katalog		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan kinerja yang baik	Risiko Fraud	Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukan	RF.RSO.25.3 6.28.110		Beberapa kegiatan tidak ada anggaran	1. Tujuan program tidak tepat sasaran 2. Turunnya kepercayaan PD lain dan masyarakat			
			Pengukuran Kinerja	Risiko Kepatuhan	Pengukuran kinerja secara periodik belum optimal	RKPT.RSO.25 .36.28.116	16	1. Beranggapan yang melaksanakan desk adalah rekan kerja 2. Keterbatasan SDM dan Waktu	1. Data tidak lengkap 2. Penyusunan laporan LKJIP terganggu 3. Penilaian kinerja Bappeda tidak menjadi optimal	1. Menetapkan SOP pengukuran kinerja 2. Peningkatan kapasitas SDM 3. Penguatan peran evaluator/verifikasi kinerja (Pena Kita)		
				Risiko Fraud	Penggunaan data yang tidak tervalidasi sebagai dasar pelaporan kinerja	RF.RSO.25.3 6.28.117	3	Sistem validasi yang belum optimal	Penurunan kepercayaan	1. Pengatan sistem validasi data 2. Meeningkatkan kapasitas SDM 3. Penguatan koordinasi intern		
			Koordinasi	Risiko Fraud	Penyimpangan penggunaan anggaran koordinasi	RF.RSO.25.3 6.28.123	3	1. Kegiatan lain yang tidak teranggarkan 2. Tidak ada transparansi laporan keuangan	1.kegiatan tidak tepat sasaran 2. Merusak reputasi Bappeda			
				Risiko Operasional	Pergantian personil PIC (staf yang diberitanggungjawab) koordinasai tanpa ada serah terima yang memadai	RO.RSO.25.3 6.28.125	16	1. Adanya mutasi pegawai 2. Tidak ada SOP serah terima	Proses koordinasi harus diulang	1. Menyusun dan menerapkan SOP serah terima jabatan 2. Membuat BA serat Terima pekerjaan 3. Menugaskan 2 personil untuk berkoordinasi		

			Pelaporan Kinerja	Risiko Kepatuhan	Tidak ada dokumentasi proses penyusunan dokumen perencanaan	RKPT.RSO.25.36.28.128	16	Tidak dilakukannya administrasi yang lengkap dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	1. Potensi temuan kesalahan administrasi 2. Sulit membuktikan keterlibatan stakeholder	1. Menerapkan SOP penyusunan dokumen perencanaan 2. Mewajibkan dokumentasi setiap proses penyusunan dokumen perencanaan 3. Membangun sistem arsip digital/manual		
				Risiko Fraud	manipulasi data LkjIP kinerja agar terlihat baik	RF.RSO.25.36.28.129	1	konflik kepentingan untuk mendapatkan nilai SAKIP tinggi	pengambilan kebijakan tidak sesuai kondisi nyata	1. Meningkatkan integritas di lingkungan Bappeda 2. Meningkatkan peran pengendalian intern		
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Risiko Kebijakan	Belum optimalnya kebijakan internal yang mengatur mekanisme monev	RKBJ.RSO.25.36.28.133	16	1. SOP Monev belum diimplementasikan 2. Kebijakan Tim Monev yang belum optimal	1. Keterbatasan waktu 2. Pelaksanaan monev yang tidak konsisten	1. Menyempurnakan dan mengimplementasi SOP Monev secara efektif 2. Digitalisasi proses monev (geogle form)		
				Risiko Fraud	Perubahan mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi tidak terlalu mendalam	RF.RSO.25.36.28.135	3	adanya perintah untuk menutupi masalah saat monitoring dan evaluasi	masalah tidak teratasi	1. Memperkuat SOP Monev (hasil monev disertai dokumentasi) 2. Melaksanakan monitoring hasil Tindak Lanjutnya		
				Risiko Operasional	Minimnya tindakanjnut hasil monev	RO.RSO.25.36.28.137	17	1. Mekanisme pemantauan belum optimal 2. Keterbatasan SDM dan waktu	Kinerja Stagnan	1. Mengintegrasikan pemantauan Rencana Tindak Lanjut melalui rapat koordinasi intern 2. Digitalisasi proses pemantauan (geogle spretshet) 3. Optimalisasi SDM intern		